

## KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK: STUDI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2020-2021

Erwin Syahrial<sup>1\*</sup>, Asran Jalal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional  
Email : ersyah@gmail.com, asran\_jalal@yahoo.com

\*Korespondensi:ersyah@gmail.com

(Submission 13-07-2023, Revisions 15-09-2023, Accepted 21-09-2023).

### Abstract

*Political parties are formed due to coalitions of several parties, not only having common goals and interests but also individual interests. Parties become a representation of diverse identities and interests, members who have the most similar or close views and preferences have the urge to gather together and create sub-groups or factions within a party. Within the party, factions work together to produce party unity, while competing for control of the party. But not a few end up splitting. The internal conflict of the Democratic Party surfaced to the public when an Extraordinary Congress was held in 2021 which resulted in a rival management. This research provides an overview of the causes of conflict, the characteristics of conflict and the approach model in conflict resolution. The research method is qualitative with an analytical descriptive approach. The research uses political party theory to explain the background of party formation and personalization symptoms that are a problem in party institutionalization. Intra-party conflict theory is used to understand the conflict model that occurs. The results revealed the existence of faction factors, party personalization and power relations have become sources and causes of conflict. The characteristics of the conflict have made this conflict not so widespread and enlarged. Elite conflict, which is premature and pragmatic, and the element of power rationality are factors that can answer why the conflict takes place and finishes quickly. In the conflict resolution model, both camps took a third party, namely the government and the court, to decide the dispute.*

**Keywords:** party politic; faction; personalization; party conflict; democratic elite.

### Abstrak

Partai politik terbentuk karena koalisi beberapa pihak, tidak hanya memiliki tujuan dan kepentingan bersama tetapi juga kepentingan individu. Partai menjadi representasi beragam identitas dan kepentingan, anggota yang memiliki pandangan dan preferensi paling mirip atau dekat memiliki dorongan berkumpul bersama dan membuat sub kelompok atau faksi di dalam sebuah partai. Di dalam tubuh partai, faksi bekerja sama untuk menghasilkan persatuan partai, sekaligus bersaing untuk mengambil kendali partai. Namun tidak sedikit yang berakhir dengan perpecahan. Konflik internal Partai Demokrat mengemuka ke publik saat digelar Kongres Luar Biasa pada 2021 yang menghasilkan kepengurusan tandingan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang penyebab konflik, karakteristik konflik dan model pendekatan dalam penyelesaian konflik. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian menggunakan teori partai politik untuk menjelaskan latar pembentukan partai dan gejala personalisasi yang menjadi soal dalam pelembagaan partai. Teori konflik intra partai digunakan untuk memahami model konflik yang terjadi. Hasil penelitian mengungkapkan keberadaan faktor faksi, personalisasi partai dan relasi kekuasaan telah menjadi sumber dan sebab konflik. Karakteristik konflik telah menjadikan konflik ini tidak begitu meluas dan membesar. Konflik elite, bersifat prematur dan pragmatis dan unsur rasionalitas kekuasaan merupakan faktor yang dapat menjawab mengapa konflik berlangsung dan selesai dengan cepat. Dalam model penyelesaian konflik kedua kubu mengambil pihak ketiga yaitu pemerintah dan pengadilan dalam memutuskan sengketa yang terjadi.

**Kata Kunci:** partai politik; faksi; personalisasi; konflik partai; elit demokrat.

### PENDAHULUAN

Sejarah perpecahan dalam bentuk dualisme kepemimpinan yang terjadi di dalam tubuh partai politik di Indonesia telah menjadi semacam pola konflik yang kerap berulang. Konflik di internal

Partai Demokrat mulai mencuat ke publik ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum menyatakan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dalam suatu konferensi pers pada 1 Februari 2021. Ia menyatakan, gerakan ini melibatkan empat mantan kader dan seorang pejabat penting di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo, yang ingin menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat. KLB benar terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil dari KLB adalah memilih Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui proses pemugutan suara (*voting*).

AHY menyatakan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Acara tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum, antara lain lantaran tidak mendapatkan izin Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kongres itu *abal-abal*. Kepengurusan AHY sudah disahkan pemerintah melalui Kemenkumham. Setelah gagal membendung Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, AHY berfokus mencegah kepengurusan partai berpindah ke Moeldoko. Tak hanya menyiapkan argumentasi hukum, ia pun menggelar safari ke lembaga negara dan tokoh politik (Tempo, 9/3/2021).

Dalam proses selanjutnya, masing-masing pihak kemudian saling mengadu argumentasi soal keabsahan dan legitimasi kepengurusan Partai Demokrat, baik secara kedudukan maupun pengakuan dari penengah/pemerintah. Konflik mulai mereda saat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang dengan sejumlah alasan. Begitu pun sejumlah gugatan di pengadilan dan pengujian AD/ART di Mahkamah Agung sebagai upaya hukum pun terhenti, termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK) pun ditolak (Lihat Tempo, 10/10/2023). Keputusan pemerintah melalui Kemenkumham serta ketetapan pengadilan menjadi keputusan yang menegaskan soal kebenaran dan legalitas Partai Demokrat.

Prahalah yang terjadi di tubuh Partai Demokrat terhitung sejak diungkapkan oleh AHY pada awal Februari 2021 sampai dengan dikeluarkannya keputusan oleh Kemenkumham berlangsung hanya dua bulan. Partai Demokrat tampak solid dan kembali pulih setelah menyelesaikan persoalan internalnya. Konflik yang terjadi pada Partai Demokrat sebagaimana diuraikan di atas, menjadi latar belakang yang dikembangkannya dalam penelitian ini. Terdapat dua aspek utama di dalam konflik yang menjadi kajian di dalam penelitian ini. Aspek pertama adalah sumber dan penyebab konflik. Kedua, model penyelesaian konflik dengan memahami anatomi konflik melalui argumentasi dan langkah yang dibangun oleh kedua pihak.

Terdapat kebaruan dalam kajian terkait konflik di tubuh Partai Demokrat ini, dimana konflik ini telah menghadirkan tokoh atau sosok dari eksternal partai yang didaulat menjadi ketua umum. Kebaruan yang lain adalah konflik cenderung berlangsung secara cepat dan tidak berlarut. Pengalaman Partai Demokrat tersebut boleh jadi akan memberi *best practice* dalam perbaikan pengelolaan kehidupan kepartaian di Indonesia.

## Kajian Literatur

- Partai Politik

Partai politik menjadi fitur penting dalam sistem politik banyak negara. Demokrasi menghendaki keberadaan partai politik. Katz (2007) menyebut kualitas demokrasi berhubungan dengan karakteristik dan sifat partai, sekaligus untuk menilai kebaikan dan kecacatan suatu rezim. Kepentingan elektoral telah tegas membedakan partai politik dengan organisasi yang lain. Bersamaan dengan peran partai pada sistem politik, muncul pengertian partai politik yang menyorot pada aspirasi elektoral sebagai fitur pembeda dari kelompok lain yang berusaha memengaruhi kebijakan publik.

Fungsi inti partai sebagaimana Gunther dan Diamond (2001) adalah untuk rekrutmen elite. Partai politik didirikan sebagai wadah menyalurkan aspirasi masyarakat. Crotty (2006) menyebut partai menjadi penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, dan sarana untuk menyalurkan kebutuhan perwakilan ke atas. Partai politik berada pada posisi tengah antara rakyat dengan pemerintah. Peran partai politik adalah untuk memungkinkan penyelesaian perbedaan secara damai dan untuk berkompromi dan mengakomodasi kepentingan yang bertentangan. Crotty

(2006) menyatakan, politik demokrasi didasarkan pada konflik. Hal ini berarti akan mengadu kelompok, wilayah, afiliasi etnis, agama, ras dan apapun bentuk keinginan atau komitmen satu sama lain.

Latar pembentukan partai juga bisa menjadi sangat pragmatis. Mendrofa dan Efriza (2022) menyatakan bahwa partai bukan semata didirikan sebagai wadah penyaluran aspirasi tertentu, tetapi juga karena dukungan terhadap tokoh tertentu. Partai politik seperti Demokrat, Gerindra dan PDIP tidak dapat mengelakkan diri menjadi personal karena memang sejarah pembentukan partainya mengandung unsur ketokohan. Pemimpin partai menjadi identitas yang melekat kepada partai. Ia bukan hanya berperan sebagai ikon, melainkan juga memainkan fungsi secara kelembagaan. Masyarakat mengetahui partai sebagai bagian tak terpisahkan dari individu pemimpinnya. Bagi partai yang mengalami personalisasi politik, individu elite punya pengaruh terhadap partai dalam jangka waktu lama. Tokoh menjadi sangat sentral karena dipengaruhi oleh dua hal: *pertama*, sumber dana terbesar untuk partai, mayoritas berasal dari kantongnya sendiri. *Kedua*, elite partai diyakini memiliki kharisma yang kuat dan penting bagi perjuangan partai. Dua hal ini menjadikannya sebagai sosok berkharisma yang dapat menyatukan kader sekaligus memimpin partai (Mendrofa dan Efriza, 2022).

- **Konflik Intra Partai**

Sebagai representasi beragam identitas dan kepentingan, partai politik bukan organisasi bersifat homogen. Partai bersifat kolektif karena terbentuk dari koalisi beberapa pihak. Bukan hanya memiliki tujuan dan kepentingan bersama tetapi juga kepentingan individu. Setiap anggota partai memiliki preferensi masing-masing, ambisi dan minat yang bermacam-macam, yang secara alami tidak dapat disatukan satu sama lain. Dengan latar tersebut, anggota dengan pandangan dan preferensi paling mirip atau dekat memiliki dorongan berkumpul bersama dan membuat sub kelompok atau faksi di dalam sebuah partai. Merujuk pada proses ini, partai dapat dianggap sebagai koalisi faksi-faksi (Ceron, 2019).

Sartori (dalam Ceron, 2019) menyebut faksi sebagai *personalized power group* yang berkomitmen penuh pada manipulasi kekuasaan. Faksi ini bisa dibedakan menjadi faksi yang berorientasi ideologis dan faksi pragmatis. Sartori melihat faksi ideologis pun cenderung menjadi pragmatis dengan tetap mempertahankan ideologi sebatas tujuan instrumental. Boucek (2012) menyebut faksionalisme merupakan proses pembagian sub-kelompok yang memiliki atribut khusus tertentu. Perbedaan sikap, kepentingan dan ambisi yang beragam dapat menimbulkan persaingan dan mengukuhkan keberadaan faksi. Faksi mengandung dua elemen penting: *Pertama*, ia adalah sub kelompok yang menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar; dan *kedua*, sub-kelompok tersebut dipersatukan oleh identitas dan tujuan yang sama.

Di dalam partai, faksi bekerja sama untuk menghasilkan persatuan partai, sekaligus bersaing untuk mengambil kendali partai dan memaksimalkan imbalan atau manfaat yang dapat diperoleh saat menjabat. Dengan cara ini politik intra partai berayun antara konflik dan kerja sama dengan mencari keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, konflik dan negosiasi antar faksi terjadi di bawah bayang-bayang perpecahan partai (Boucek, 2012).

Sartori (dalam Ceron, 2019) melihat adanya kenyataan bahwa partai cenderung terpecah akibat adanya ketidaksetujuan lawan dan perkelahian antar politikus di dalam partai. Jeong (2008) melihat heterogenitas keanggotaan kelompok menciptakan kesulitan dalam mencapai konsensus tentang cara-cara, bahkan jika telah ada kesepakatan terhadap tujuan umum sekalipun. Selain itu, faksi memang diciptakan sebagai bentuk persengkongkolan beberapa pemimpin partai untuk melindungi hubungan patron kliennya. Patronase sebagai salah satu sebab terbentuknya faksi menjadi aspek yang khas yang ditemukan dalam politik di Asia tenggara termasuk Indonesia.

Faksi-faksi bersaing satu sama lain untuk menguasai partai dan memaksimalkan bagian keuntungan yang bisa didapatkan sekaligus harus bekerja sama untuk kepentingan partai. Pemimpin atau elite partai menjadi pihak yang bertanggung jawab dan bertugas menjadi agen penjaga persatuan dengan mengalokasikan insentif atau imbalan yang patut untuk mendorong faksi partai berkolaborasi dalam kerja pemilu dan membuat kohesi partai (Ceron, 2019). Pemimpin partai mengelola keputusan tentang alokasi ini dengan tetap mempertahankan bagian

bagi diri dan kelompoknya namun tetap meminimalkan kerusakan akibat konflik terhadap faksi yang lain. Apabila pemimpin partai politik bersifat otonom dalam pengambilan keputusan partai dan dapat menggunakan kekuasaan untuk menciptakan disiplin partai, maka ancaman perpecahan partai dapat direduksi dan soliditas partai dapat terjaga (Ceron, 2019).

Kadang-kadang ada partai yang berhasil memulihkan persatuannya, yaitu ketika berhasil mencapai keseimbangan internal yang mendorong semua faksi untuk bekerja sama. Ada pula konflik faksi menjadi semakin memburuk dan membuat perpecahan partai. Hal ini telah menjadi realitas politik kepartaian (Ceron, 2019). Kongres partai merupakan momen kunci dalam kehidupan internal partai. Pada arena itu, setiap faksi mengorganisir tim dan kandidat untuk mendapatkan dukungan suara dari anggota lain dan menjadi jalan untuk masuk ke badan partai dan memetakan struktur faksi yang ada (Ceron, 2019). Nuryanti (2018) dalam analisisnya menyebutkan bahwa perebutan kursi ketua umum partai menjadi penyebab konflik intra partai, selain perbedaan pandang atas AD/ART partai politik. Posisi politik mempunyai daya tarik yang tinggi sehingga menjadi rebutan karena berbagai sebab (lebih lanjut lihat Rauf, 2001). Ketua umum memiliki kuasa yang tertinggi di dalam partai dan sering menyalahgunakan partai untuk kepentingan diri atau kelompoknya sendiri. Hal inilah yang menjadikan posisi ketua umum menjadi incaran banyak elite partai (Nuryanti, 2018).

Elite oligarkis yang dominan dan terlalu menguasai partai menimbulkan sejumlah faksi yang tidak diuntungkan atau merasa tidak tersalurkan aspirasinya melakukan protes yang kemudian memicu lahirnya konflik hingga faksionalisasi partai. Konflik yang terjadi merupakan bentuk konflik politik. Rauf (2001) menyebut bahwa konflik politik selalu bersifat konflik kelompok. Jeong (2008) menyebut konflik antar kelompok sering kali merepresentasikan cara hidup dan ideologi yang berbeda yang berimplikasi pada pandangan yang tidak sejalan tentang hubungan dengan orang lain.

- **Manajemen Konflik**

Pengaturan manajemen konflik partai politik ada di UU partai politik dan dirumuskan secara internal di dalam AD/ART partai dengan membentuk mahkamah partai. Darmawan (2018) menyebutkan bahwa penyelesaian melalui mahkamah partai sejauh ini belum dapat memberikan hasil positif karena putusnya cenderung diabaikan oleh faksi di lingkungan internal partai politik. Pengabaian itu membuat putusan mahkamah partai tidak memiliki daya eksekutorial. Adanya pengabaian atas keputusan mahkamah partai sesungguhnya terjadi karena adanya kecurigaan bahwa mahkamah partai tidak bersikap netral ketika memeriksa dan memutuskan konflik partai. Mahkamah partai dianggap berpihak dan bahkan menjadi bagian dari salah satu pihak berkonflik sehingga keputusan yang dihasilkan sulit objektif. Dengan pengabaian atas keputusan mahkamah partai, maka faksi yang berkonflik akan mencari jalan lain untuk memenangkan posisinya dalam partai, termasuk menggunakan jalur hukum dan melibatkan pemerintah (Darmawan, 2018). Posisi pemerintah diperlukan, sebagaimana Jeong (2008) katakan, kekuasaan menjadi elemen penting dalam perjuangan untuk memenangkan konflik.

Rauf (2001) menyebut konsensus dapat dicapai dengan mediasi. Jeong menyatakan pihak ketiga dapat memainkan peran penting dalam mengisi sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelesaian atau dalam membatasi penggunaan cara-cara ekstrim melalui upaya mereka untuk mengendalikan kekerasan. Perantara dapat berupa mediator, arbiter, dan pihak-pihak lain yang berada dalam posisi untuk memfasilitasi proses penyelesaian atau resolusi. Berangkat dari pengalaman penyelesaian sejumlah konflik partai, Darmawan (2018) melihat terkadang kehadiran pemerintah bukanlah sebagai pihak yang mendorong penyelesaian konflik ke arah penguatan partai. Keterlibatan pemerintah tidak sekedar sebagai mediator yang netral tapi didasari juga oleh kepentingan politik tertentu.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk analisis deskriptif. Pengambilan data penelitian menggunakan metode wawancara narasumber terkait untuk menggali informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data sekunder untuk melengkapi data

penelitian, berasal dari dokumen AD/ART Partai Demokrat, Undang-Undang Partai Politik, artikel investigasi media massa dan berita yang mengikuti perkembangan kejadian dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini telah mendapatkan fakta mengenai konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat yang dipicu oleh keberadaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang telah terjadi pada 2021 lalu. Keterangan dari sejumlah narasumber telah memberikan sejumlah informasi penting. Dengan didukung data dari publikasi sejumlah media yang mengikuti perkembangan konflik tersebut, sebab-sebab konflik yang terjadi pada Partai Demokrat bisa dirumuskan ke dalam tiga kategori yang saling terkait, yaitu: faksionalisme, personalisasi politik dan relasi kekuasaan yang berkelindan. Ketiga kategori inilah yang memunculkan konflik di tubuh Partai Demokrat setelah keterpilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres Partai Demokrat tahun 2020.

- **Faksionalisme**

Faksi diartikan sebagai kelompok intra partai yang anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan faksi sangat beragam termasuk mempertahankan kontrol faksi atas partai, mempengaruhi strategi dan kebijakan partai serta mengusulkan serangkaian nilai baru kepada partai (Budiatri, 2018). Studi terhadap kasus Partai Demokrat ini menarik untuk dikaji karena membawa --paling tidak-- mantan anggota partai dan Moeldoko selaku pihak eksternal untuk menjadi bagian dari konflik.

Faksi partai adalah gejala yang sering terjadi, yang secara eksistensial sulit untuk dihindari. Hampir semua partai di Indonesia tampaknya telah mengalami konflik demikian, yang kadang menjadi sangat serius hingga berujung pada perpecahan. Faksi itu sendiri merupakan kekuatan dalam partai untuk berkompetisi memperoleh dominasi penting dalam struktur, pengambilan keputusan partai dan menentukan calon untuk mengisi kursi politik pemerintah (Wahyuni dan Ayu, 2020).

Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa konflik internal partai melekat dengan kemunculan faksi di dalam partai. Faksionalisasi terjadi karena adanya kesamaan atribusi nilai dan ideologi atau karena kesamaan identitas dirinya (Budiatri, 2018). Misalnya saja, generasi tua partai akan membentuk faksi untuk melindungi kepentingan, status dan kedudukan mereka di dalam partai. Hal ini juga terjadi dalam tubuh Partai Demokrat. ketika para tokoh senior merasa tidak siap dengan perubahan kepemimpinan muda yang dibawa oleh ketua umum AHY di dalam mengelola partai, maka situasi ini memunculkan konflik. Kasus Partai Demokrat memperlihatkan pola kepemimpinan elite partai dapat menjadi faktor yang mempengaruhi faksionalisasi partai.

Faksionalisme merupakan salah satu diantara sekian alasan penyebab terjadinya konflik. Struktur organisasi partai tampak telah menjadi sebab faksionalisasi itu bekerja. Faksi yang berakhir pada konflik internal partai muncul akibat dari tidak terdistribusinya secara adil posisi dan jabatan strategis serta terdesentralisasinya struktur kepengurusan partai hingga di tingkat lokal (Budiatri, 2018). Keberadaan faksi dapat menjadi penyebab sekaligus konsekuensi atas dinamika pengelolaan partai yang dianggap tidak lagi ideal.

- **Personalisasi Partai**

Tampak sekali relasi yang kuat antara SBY dengan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik, terutama pada awalnya untuk maju menjadi kandidat calon presiden. Peran SBY juga sangat signifikan saat Partai Demokrat diterpa prahara pasca penetapan Anas Urbaningrum menjadi tersangka korupsi. Namun kemudian, situasi ini mengarahkan Partai Demokrat dalam gejala personalisasi partai. Kondisi yang menempatkan dimana aktor individu menjadi lebih utama dan lebih penting dibandingkan kelembagaan partai politik atau identitas kolektifnya.

Ketergantungan partai pada tokoh sentral dapat menyebabkan terjadinya kooptasi partai oleh kepentingan individu, bukan kepentingan kolektif ataupun publik sebagaimana seharusnya. Institusionalisasi partai yang tidak berjalan pada akhirnya akan berdampak pada masa depan

partai. Hal ini dapat diperhatikan dari karakteristik yang melekat pada suatu partai politik. Karakteristik pertama adalah lekatnya identitas atau *image* partai politik kepada pemimpin partai. Karakteristik kedua, yaitu ditematkannya individu elite sebagai penarik dukungan dan suara bagi partai, yaitu ketika tokoh sentral berperan menggantikan pengaruh ideologi dan identifikasi lain untuk menarik dukungan konstituen partai. Karakteristik yang ketiga adalah kuatnya pengaruh tokoh sentral terhadap partai dalam jangka waktu yang lama, bahkan selama individu tersebut masih hidup (Budiatri, 2018).

Analisis Budiatri (2018) mengenai pengalaman konflik di partai politik sepanjang reformasi menunjukkan bahwa konflik terjadi karena soal ideologi partai dan melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis serta koalisi partai yang cair. Pelembagaan personal ke dalam tubuh partai dianggap nyata terlihat pada kewenangan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Secara jangka pendek, personalisasi politik bisa saja justru mendorong terjadi kohesivitas partai. Hal ini karena pengelolaan partai yang sentralistis cenderung efisien dan menutup potensi perdebatan di dalam partai. Namun dalam jangka panjang, konflik internal dan faksionalisasi justru kerap akan terjadi ketika muncul ketidakpuasan terhadap keputusan elite dan ada seseorang atau faksi yang merasa ide gagasan dan kepentingannya tidak terepresentasi melalui keputusan tersebut (Budiatri, 2018).

Gejala yang terjadi di dalam partai Demokrat pasca Anas Urbaningrum tampaknya sesuai dengan yang disebutkan oleh Nurhasim (2018), bahwa setelah konflik justru partai mengarah pada proses oligarki yang jauh lebih kuat karena tidak ada penyeimbang kekuatan pada internal partai ketika oposisi atau faksi-faksi lainnya disingkirkan. Partai umumnya menjadi tidak lentur karena elite-elite baru yang memimpin ingin dapat mengendalikan faksi-faksi yang masih ada atau masih tersisa bahkan untuk menghindari agar konflik internal tidak terulang kembali. Bangunan partai atau organisasi berubah ke arah personal dimana elite partai atau ketua umumnya menjadi penentu.

- Relasi Kekuasaan

Faksionalisme Partai Demokrat dibicarakan dalam cakupan yang lebih luas karena sampai melibatkan aktor-aktor eksternal. Kepemimpinan AHY digoyang oleh mantan kader senior Partai Demokrat menarik perhatian karena konflik yang timbul memiliki sedikit perbedaan, yaitu adanya pelibatan non anggota Partai Demokrat dimana kubu KLB memilih KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum-nya. Karenanya, kemunculan KLB juga diduga kuat memiliki relasi kekuasaan di belakangnya.

Relasi kuasa politik dalam konflik yang dialami Partai Demokrat bagaimanapun juga tidak bisa dihilangkan sebagai aspek penting mengingat sumber daya kekuasaan yang begitu besar, baik dari sisi finansial maupun legitimasi. Kehadiran Moeldoko diyakini akan membuka potensi dan peluang lebih besar untuk dapat memenangkan pertarungan dengan kelompok Pro-SBY yang sekarang sedang memegang tampuk kepemimpinan di Partai Demokrat.

Dalam kajiannya, Romli (2018) melihat keberadaan kepengurusan ganda pada partai politik disebabkan oleh posisi dalam mendukung atau berseberangan pada koalisi pemerintahan. Konflik politik bisa terjadi karena perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok yang satu dengan yang lain, baik itu perbedaan kepentingan politik ataupun oleh perbedaan kepentingan kekuasaan. Ini karena kekuasaan bisa memberikan daya tarik dan keuntungan bagi pihak-pihak yang menggenggamnya, baik berupa materi maupun fasilitas yang lebih, yang tidak bisa begitu saja didapatkan oleh kebanyakan orang. Dengan adanya relasi-kekuasaan, konflik di dalam partai terjadi karena pada satu pihak ingin mendapatkan segala fasilitas kekuasaan tersebut, sekaligus pada sisi yang lain ada pihak yang ingin menggunakan partai politik untuk menggapai dan mempertahankan kekuasaan yang telah digenggam tersebut.

Selanjutnya, pemahaman terhadap karakteristik konflik menjadi penting untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa konflik yang terjadi pada Partai Demokrat tahun 2021 begitu cepat membesar dan menyusut dalam tempo yang singkat. Konflik tampak muncul secara tiba-tiba dan hanya dalam waktu sekira dua bulan saja, mereda seiring dengan kekalahan di kubu KLB. Bagaimana terjadi demikian, dapat diuraikan dengan pemaparan sebagai berikut:

1) Konflik Elite

Sebagaimana lazimnya dalam setiap organisasi sosial, pelapisan atau stratifikasi mesti ada. Seseorang atau sekelompok individu dikatakan sebagai elite bila menempati strata atas pada piramida sosial. Konflik elite yang terjadi pada perebutan jabatan dan kepemimpinan Partai Demokrat, terjadi di dalam kerangka posisi dan pengaruh aktor yang terlibat dalam konflik. Sejumlah kader Demokrat yang dipecat merupakan orang-orang yang pernah ikut serta dalam membangun partai hingga menduduki jabatan tinggi dalam kepengurusan partai. Para pihak yang terlibat KLB telah memegang peran penting di struktur kepengurusan partai pada masanya. Pengaruh mereka lambat laun melemah dan tergantikan dengan yang lain karena hubungan secara hirarkis kepartaian sudah tidak ada lagi. Hal inilah yang membuat peran dan pengaruh mereka kepada pengurus daerah (DPD dan DPC) Partai Demokrat tidak lagi signifikan. Oleh sebab itu KLB tidak serta merta didukung secara antusias dan penuh dari para kader di bawah. Pada konteks inilah istilah konflik elite dapat dimaknai sebagai salah satu dari karakteristik konflik yang dipaparkan.

2) Prematur dan Pragmatis.

Gerakan yang terlampau singkat menyebabkan kelahiran yang prematur, yaitu pada kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tuntutan lingkungannya, baik dari lawan maupun tata aturan yang berlaku. Kegagalan dalam menghimpun dukungan dan legitimasi dari kader telah menjadikan kelompok KLB kalah pada setiap aspek gugatannya. Secara internal, minimnya dukungan kepada kelompok KLB tampak pada risiko yang tidak berani diambil oleh kader dan pengurus di tingkat daerah. Kelemahan kelompok KLB sangat terlihat pada persiapannya menghadap Kemenkumham. Sejumlah dokumentasi kegiatan tidak dapat dilengkapi secara apik sebagai persyaratan untuk mendaftarkan KLB hingga mendapatkan pengesahan. Kubu Moeldoko tidak melakukan proses yang cukup dalam rangka sosialisasi ke daerah-daerah untuk membangun basis sehingga tidak berhasil memperoleh dukungan secara nyata. Oleh sebab itu gerakannya begitu cepat, cepat membesar sekaligus cepat menyusut.

3) Rasionalitas Kekuasaan.

Sesuatu yang terlihat berbeda dari konflik Partai Demokrat manakala AHY telah membuka ke ruang publik atas apa yang tengah terjadi pada partainya, memunculkan beragam reaksi baik di media sosial maupun media *mainstream* nasional. Strategi komunikasi terbuka AHY dalam upaya penyelesaian konflik itu dapat dimaknai dalam rangka membangun dukungan publik untuk dapat bertahan menghadapi kekuasaan. Bagi AHY dan Partai Demokrat, simpati dan dukungan publik penting dan sangat berpengaruh sebagai bagian dari perjuangan hingga KLB dianggap ilegal dan ditolak oleh pemerintah. Komunikasi terbuka AHY secara langsung menjadi sorotan media utama dengan melihat secara aktif sikap dan tindakan berikutnya. Termasuk diantaranya kegiatan safari politik kepada sejumlah tokoh telah menjadi perhatian dan pemberitaan di sejumlah media. Berturut-turut, AHY menemui Menko Polhukam Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, hingga mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Silaturahmi politik kepada elite bertujuan tidak hanya untuk memperoleh dukungan dengan memberikan informasi yang berimbang, tentu juga menuntut untuk memberi sikap yang tentunya mengarah pada posisi yang paling tidak netral sekaligus mendorong bagaimana kekuasaan juga bersikap serupa sebagai bentuk integritas, baik sebagai pribadi presiden maupun pemerintahan. Perhatian publik pada bagaimana sikap kekuasaan atau pemerintah menyikapi konflik ini, telah memaksa pemerintah untuk bersikap secara netral, profesional dan rasional. Rasionalitas pemerintah terlihat pada sikap Menkopolkum Mahfud MD yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak mendukung pihak manapun. Pemerintah akan bersikap objektif menurut peraturan yang ada.

Model penyelesaian konflik di tubuh Partai Demokrat, dapat dilihat dalam dimensi internal, dimensi eksternal dan pasca konflik. Dimensi internal partai mencakup konsolidasi pengurus dan mekanisme penyelesaian konflik melalui mahkamah partai. Dimensi eksternal meliputi komunikasi publik dan pendekatan elite.

- Dimensi internal

Tindakan partai ketika menghadapi konflik, apalagi menyangkut soal kepengurusan sudah semestinya melakukan konsolidasi internalnya. Perpecahan terjadi manakala struktur kepemimpinan tidak solid, baik di tingkat pusat maupun daerah. AHY berhasil menepis dugaan keretakan dalam kepengurusan di daerah dengan membawa seluruh DPD kepada Kemenkumham dengan kelengkapan administrasi sekaligus menegaskan legalitas dan keutuhan partainya. Pelembagaan partai politik akan sangat terlihat pada mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi pada tubuh partai. Salah satu bentuk kemandirian partai politik terlihat dari kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara otonom. Ketentuan dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, yang telah diakui oleh pemerintah, tercantum fungsi dari Mahkamah Partai dalam menyelesaikan konflik internal partai. Pihak KLB melihat fungsi dari Mahkamah Partai justru tidak final dan mengikat karena keputusan akhir berada pada Majelis Tinggi. Keputusan dari Mahkamah Partai hanya bersifat rekomendasi menurut ketentuan AD/ART tahun 2020. Sebagaimana analisis Darmawan (2018), lembaga mahkamah partai masih belum mampu bekerja optimal, baik karena kedudukan maupun anggapan menjadi bagian pihak berkonflik. Mekanisme penyelesaian melalui mahkamah partai dalam sengketa Partai Demokrat tidak terjadi.

- Dimensi Eksternal

Pendekatan penyelesaian konflik yang terjadi pada Partai Demokrat, menjadi cukup menarik perhatian oleh karena AHY sendiri yang menyampaikan secara terbuka. Sebelumnya publik tidak mengetahui sama sekali atas apa yang terjadi, mengingat kongres Partai Demokrat tahun 2020 berlangsung mulus dan memilih AHY secara aklamasi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah menyiapkan orang-orang yang bertugas untuk mengkomunikasikan kepada khayalak terkait perkembangan yang terjadi. Sebagai bagian dari strategi Demokrat, DPP telah menerbitkan para juru bicara (jubir) Demokrat untuk menjelaskan isu-isu terkait kepada publik. Strategi komunikasi terbuka yang dilakukan AHY merupakan model penyelesaian konflik yang tidak saja menarik perhatian karena memberi pendekatan berbeda namun dapat digunakan sedemikian rupa untuk kepentingan elektoral Partai Demokrat itu sendiri. Baik dari kelompok KLB maupun AHY tetap mengandalkan keputusan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi. Pemerintah menjadi penentu atas siapa yang berhak dan diakui memegang kendali Partai Demokrat. Mekanisme penyelesaian konflik ialah dengan menjadikan pemerintah dan/atau pengadilan memutuskan perkara diantara para pihak yang berkonflik. Pihak berkonflik melihat kekuasaan menjadi elemen penting dalam perjuangan memenangkan konflik. Legitimasi pemerintah diperlukan, sebagaimana disebutkan Jalal (2022), karena memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk membuat keputusan penyelesaian konflik.

- Pasca Konflik

Setelah berhasil mempertahankan kepemimpinan hasil kongres 2020, DPP Partai Demokrat tidak tinggal diam. Sejumlah langkah telah ditempuh oleh Partai Demokrat untuk membenahi internal partainya pasca konflik. Konsekuensi pemecatan bagi kader yang terlibat dan bersalah menjadi bagian dari keputusan partai untuk menjaga soliditas partai.

## SIMPULAN

Berbagai penelitian terdahulu telah menguatkan gejala kepertaian sebagaimana pula dialami oleh Partai Demokrat. Bahwa, konflik yang terjadi di dalam partai bisa diakibatkan oleh ketidakpuasan salah satu kelompok dalam partai atas hegemoni faksi yang lain dalam pengelolaan partai. Faksi dominan mengontrol kerja partai dan secara bertahap menjadikan corak partai menjadi personal. Partai hanya kuat karena figur bukan pada identitas kolektif lain.

Posisi dan pilihan politik dapat mengundang atau memunculkan potensi konflik dalam tubuh partai. Kekuasaan dapat masuk dan menyelip diantara kepentingan-kepentingan kelompok intra partai untuk mengambil peran dan mendorongnya ke permukaan sehingga membuat partai dapat terbelah. Relasi kuasa politik dalam latar konflik kepengurusan partai tidak bisa diabaikan dalam

memahami anatomi dan struktur konflik. Faktor kekuasaan kerap hadir baik sebagai patron dan menjadi pemicu sekaligus memberikan peluang memenangkan pertarungan.

Demokrasi memberikan pembatasan pada kekuasaan untuk bertindak semauanya. Ia memberikan akses publik untuk mengawasi dan menilai kinerja kekuasaan. Oleh sebab itu media massa dan kanal komunikasi informasi mesti ada, sebagai wadah respon dan persepsi publik. Tekanan dan perhatian publik mampu memberikan tekanan kepada penguasa politik untuk bersikap dan bertindak sesuai aturan berlaku.

Pendekatan komunikasi terbuka oleh AHY membuktikan hal itu. Kekuasaan bisa dibatasi gerakannya oleh mata dan persepsi publik, demi menjaga integritas pribadi dan marwah lembaga kekuasaan itu. Argumen yang terarah dan sorotan publik pada pihak-pihak yang terlibat, menjadikan mereka waspada mengambil langkah dan tindakan untuk menjaga citra publiknya.

Isu pelembagaan partai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Partai seringkali gagap dalam menyelesaikan konflik internalnya. Meski secara normatif telah dibuat ketentuan mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga mahkamah partai, namun tidak berfungsi optimal sebagaimana mestinya. Lembaga mahkamah belum sepenuhnya dapat diyakini mampu bersikap untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara intra partai.

Partai belum berhasil mewujudkan dirinya sebagai pengendali konflik atau malah justru menjadi produsen konflik. Kegagalan partai dalam membangun identitas kolektif dapat mengancam eksistensi partai yang bersangkutan di masa depan. Kemandirian partai politik juga perlu diraih. Masing-masing anggota partai secara bertahap harus sampai pada kesadaran untuk menghormati aturan yang telah dibuat dalam rumah tangganya sendiri. Pada akhirnya, penanaman nilai dan pendidikan politik menjadi problem mendasar untuk menciptakan identitas kolektif. Bukan sekedar basa basi dalam narasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boucek, Francois. (2012). *Factional Politic How Dominant Parties Implode or Stabilize*, London: Palgrave Macmillan.
- Budiatri, Aisah Putri (ed.). (2018). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ceron, Andrea. (2019). *Leaders, Factions, and The Game of Intra-Party Politics*, London & New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cross, William P., Richard S. Katz dan Scott Pruyers (ed.). (2018). *The Personalization of Democratic Politics and the Challenge for Political Parties*. London: Rowman & Littlefield International.
- Diamond, Larry and Richard Gunther. (2001). *Political Parties and Democracy*, Baltimore and London: Jhon Hopkins University Press.
- Faizal, Akbar. (2005). *Partai Demokrat & SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Huntington, Samuel P. (1968). *Political Order in Changing Societies*, London: Yale University, Renewed 1996, Foreword 2006
- Jalal, Asran. (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta: Penjuru Ilmu.
- Jeong, Ho-Won. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: Sage Publications.
- Jumari. (2012). *Peran Elite dan Basis Sosial Partai Demokrat dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Katz Richard S. and William Crotty. (2006). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Katz, Richard S. (2007). *A Theory of Parties and Electoral Systems*. Published 1980, Johns Hopkins Paperback Edition. Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Marijan, Kacung. (2011). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mas'ud, Mohtar dan Colin MacAndrews. (2016). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Novianto, Kholid, M. Alfan Alfian dan Asnan. (2004). *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*. Jakarta: Sejati Press.
- Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Rifandy, Muhammad. (2017). *Konflik Internal Partai Golongan Karya dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2014*. Tesis. Jakarta: Universitas Nasional.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Cetakan Keenam. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tandjung, Akbar. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tansey, Stephen D. and Nigel Jackson. (2008). *Politics: The Basics*, 4<sup>th</sup> Edition, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Webb Paul dan Stephen White. (2007). *Party Politics in New Democracies*, New York: Oxford University Press.
- Yuniardi, Rendra. (2016). *Oligarki dan Konflik Faksi Politik Internal Partai Demokrat (Studi Konflik Masa Kepemimpinan Anas Urbaningrum)*. Tesis. Jakarta: Universitas Nasional.

## JURNAL ILMIAH

- Budiatri, Aisah Putri, dkk. (2018). "Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi", Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15, No. 2, Jakarta: LIPI.

- Diana, Yunicha dan Robi Kurniawan. (2016). "Konflik Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014". *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1.
- Fazila, Rizky dan Maimun. (2017). "Dualisme Kepemimpinan PPP menjelang Pilkada Serentak 2017". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2.
- Jalal, Asran. (2022). "Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 dan Tahun 2021. Populis, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2022.
- (2021). "Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudiono (2004-2014)." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 6, No. 2.
- (2018). "Demokratisasi di Indonesia", Makalah, Repository Universitas Nasional.
- (2017). "Refleksi Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi: Tinjauan Format Relasi Presiden-DPR", Makalah, Repository Universitas Nasional.
- Mendrofa, Kartini dan Efriza. (2022). "Analisis Personalisasi Partai Politik Di Era Reformasi". *Jurnal Administratio*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- Nurak, Anitha dan Bonefasius Bao. (2021). "Konflik Internal Partai Politik studi tentang Dualisme Kepemimpinan Partai Hanura". *Jurnal Jendela*, Vol. 9, No. 2.
- Randall, Vicky And Lars Svasand, "Party Institutionalization In New Democracies", *Journal Party Politics*, Vol. 8, No.1, Sage Publications, 2002.
- Romli, Lili. (2017). "Koalisi dan Konflik di Internal Partai Politik Era Reformasi". *Jurnal Politica*, Vol. 8, No. 2.